

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asikin, Z., 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dewata, Mukti Fajar Nur, dan Yulianto Achmad, 2006, *Dualisme Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2011, *Pedoman Pelayanan Kesehatan bagi Anak, Wanita, Lansia, dan Warga Binaan Pemasyarakatan/Tahanan dengan Kondisi Sakit Permanen di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
- Hainstock, Elizabeth G., 1999, *Teaching Montessori in The Home: Pre-School Years*, Pustaka Delapratasa, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.
- Hurbetin, Sri Purwanti, 2003, *Konsep Penerapan ASI Eksklusif*, Penerbit Buku Kedokteran: EGC, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Makarim, Edmon, 2005, *Pengantar Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada Jakarta,
- Manuaba, Ida Bagus Gde, 1998, *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana untuk Pendidikan Bidan*, Penerbit Buku Kedokteran: EGC, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasution, Bahder Johan, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Priyatno, Dwidja, 2013, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Pujileksono, Sugeng, 2017, *Sosiologi Penjara*, Intrans Publishing, Malang.

Samosir, C. Djisman, 2016, *Penologi dan Masyarakat*, Nuansa Aulia, Bandung.

Saptomo, Ade, 2007, *Pokok-pokok Metodologi Hukum*, Unesa University Press, Surabaya.

Soekanto, Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Supramono, Gatot, 1998, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.

Suriasumantri, Jujur S, 1986, *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik: Sebuah Dialog tentang Keilmuan Dewasa Ini*, Gramedia, Jakarta.

Suyadi, 2009, *Psikologi Belajar PAUD*, Pedagogia, Yogyakarta.

Wijaya, Andika, 2018, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zulfa, Eva Achjani, *et al*, 2017, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Masyarakat*, Raja Grafindo Persada, Depok.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor. 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi yang telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1148).

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 713).

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan dan Intensif Karya Narapidana.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 2007 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1185/Menkes/SK/XII/2009 tentang Peningkatan Kepesertaan Jamkesmas bagi Panti Sosial, Penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara serta Korban Bencana.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1259/Menkes/SK/XII/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Jamkesmas bagi Masyarakat Miskin Akibat Bencana, Penghuni Panti Sosial & Penghuni Lembaga Pemasyarakatan serta Rumah Tahanan Negara.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-693.PK.01.07.01 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Perawatan Kesehatan bagi Kelompok Rentan dan Risiko Tinggi (Selain TB & HIV)

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-32.PK.01.07.01 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Bapas, LPKA dan LPAS.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Semesta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 1) sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Semesta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 73).

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Semesta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 63).

Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-249.PK.01.06.02 Tahun 2017 tentang Peningkatan Layanan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dan Rumah Tahanan Negara Perempuan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-258.PK.01.06.01 Tahun 2017 tentang Rujukan Gawat Darurat dan Terencana bagi Narapidana, Tahanan dan Anak.

C. Artikel Jurnal

Kasim, Ifdal, 2001, *Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan*, eLSAM, Jakarta.

Sulastriyono, 2014, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum – Program Sarjana Mata Kuliah Wajib*, Bahan Kuliah, Rencana Program Kegiatan dan Pembelajaran Semester dan Bahan Ajar, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

D. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Arifat, Nasiematul, 2018, Pemenuhan Hak atas Kesehatan dan Makanan yang Layak bagi Warga Binaan Perempuan Hamil (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta), Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Dewi, Lily Lastriana, 2014, *Pembinaan Narapidana Wanita yang Mempunyai Anak Balita atau dalam Keadaan Mengandung di LP Wirogunan Yogyakarta*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Fernandez, Charmelita Juan, 2017, *Program Pemasyarakatan bagi Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Larastriana, Widya, 2018, Pelaksanaan Program Pelayanan Jaminan Persalinan terhadap Tahanan dan Narapidana yang Sedang Hamil di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pondok Bambu Jakarta Timur dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sianturi, Tri Julian Dewi, 2014, *Hak Narapidana Wanita yang Sedang Hamil serta Hak Anak Sejak dalam Kandungan atas Makanan Bergizi Di Lembaga Pemasyarakatan*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

E. Makalah/Pidato

Riyadi, Eko, "Kecenderungan Paradigma Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Makalah*, Advanced Training Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya bagi Dosen Hukum dan HAM, Semarang, 9 – 11 Oktober 2012.

F. Internet

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, "Sistem Database Pemasyarakatan", <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>, diakses 25 Februari 2018.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, "Sistem Database Pemasyarakatan", <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/e42acec0-7da6-1da6-981f-313533353430>, diakses 25 Februari 2018.

G. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2014 tanggal 7 Desember 2015.